



BAB 2 PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN DINAS PPKB PP DAN PA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Bupati sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tabel 2.2.1
TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)
		Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP)
2	Meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesetaraan gender dalam pembangunan serta perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan Anak

2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam upaya mencapai Tujuan, disusun Strategi secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Kebijakan merupakan pendukung strategi sekaligus sebagai arah pijakan yang secara komprehensif melibatkan seluruh sumber daya.

Tabel 2.3.1
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Advokasi terhadap pemerintah desa/kelurahan dan stakeholder untuk meningkatkan komitmen tentang pemahaman pentingnya LPP dan TFR	Meningkatkan advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi yang efektif serta peningkatan profesionalisme aparatur, pemberdayaan institusi dan kelompok-kelompok kegiatan yang ada di masyarakat
2	Peningkatan intensitas pelayanan KB statis maupun mobile dan pelayanan gratis/momentum dengan penyediaan sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang memadai di setiap faskes KB dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB) dan tenaga medis pelayanan KB (dokter bidan) serta penguatan lembaga dan organisasi di tingkat masyarakat untuk mendukung pergerakan dan penyuluhan KB.	Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas dengan didukung kerja sama yang baik dengan stakeholder serta memperkuat lembaga dan organisasi yang mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
3	Peningkatan Advokasi, Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya Kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia untuk mewujudkan keluarga yang bahagia	Pengadaan sarana kerja bagi Kader Bina Keluarga dan meningkatkan pembinaan bagi kader-kader Bina Keluarga
4	Peningkatan pembinaan terhadap kelompok-kelompok UPPKS untuk menjadi peserta KB dan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga	Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok UPPKS
5	Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif, kreatif dan inovatif guna meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan	Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
6	Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya	Pelibatan perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan politik dan sosial budaya
7	Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.	Peningkatan pemberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan.

8	Inisiasi kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penguatan kerjasama dengan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak
9	Peningkatan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial	Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan.
10	Peningkatan implementasi pemenuhan hak-hak anak melalui percepatan implementasi KLA	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada penyusunan regulasi dan kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak.

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

**TABEL 2.4.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	<p>TFR adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran.</p> <p>Rumus TFR adalah sebagai berikut:</p> $TFR = 5 \times \sum_{i=1}^7 [ASFR]_i$ <p>ASFR_i = banyaknya bayi menurut kelompok umur wanita ke i</p>	BPS	BIDANG KB DAN ADVOKASI
2. Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan	<p>Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan.</p> $\text{Rata-rata UKP Perempuan} = \frac{\sum_{i=1}^n U_i}{n}$ <p>U_i = umur perkawinan pertama wanita ke-i n = jumlah wanita menurut perkawinan pertama</p>	LAPORAN UKP	BIDANG KB DAN ADVOKASI

3. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. 1/3 (Ipar + IDM + linc-dist) Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan linc-dist = Indeks distribusi pendapatan	- Badan Pusat Statistik (BPS) Magetan - Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten	BIDANG PPPA
4. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ataupenelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga	LAPORAN KDRT	BIDANG PPPA

2.5 PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA

Laporan yang akuntabel adalah laporan yang ketercapaian sarasannya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria; *spesifik, dapat dicapai, memiliki relevansi dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur*. Indikator tersebut telah disepakati oleh setiap stakeholder sebelum proses pelaksanaan program dan kegiatan di jalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai *early warning system* yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat yang dalam hal ini Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dengan Bupati Magetan.

Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

NO	JUMLAI NILAI	KATEGORI
1	85 Sampai dengan 100	Sangat Baik
2	70 s/d kurang dari 85	Baik
3	55 s/d kurang dari 70	Cukup Baik
4	kurang dari 55	Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran terhadap realisasi dibanding target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada

pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan dalam pencapaian sasaran dan/ atau kegiatan guna meningkatkan kinerja organisasi.